

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten, Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

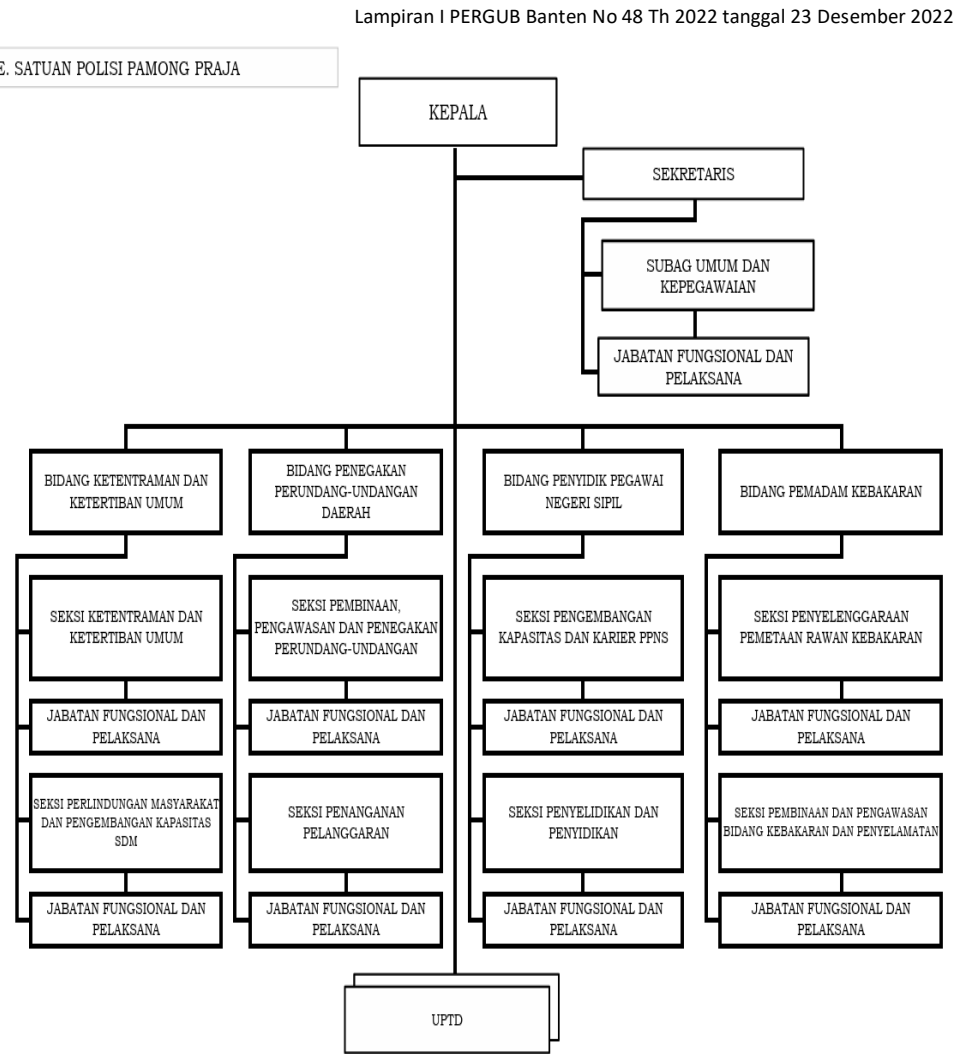
1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;

22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

1.3. **Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten**
Pada tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dipimpin oleh Agus Supriyadi, S.Sos, M.Si, selaku Kepala Satuan setingkat Esselon II/a

Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarkan Pergub Nomor 48 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Sistematika
Penulisan

1.4. **Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

BAB I PENDAHULUAN

	1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2.	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3.	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
	1.4.	Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II		IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
	2.1.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	2.2.	Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
BAB III		KEBIJAKAN AKUNTANSI
	3.1.	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	3.2.	Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	3.3.	Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	3.4.	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
BAB IV		PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
	3.1.	Penjelasan Pos-pos LRA
	4.2.	Penjelasan Pos-pos LO
	4.3.	Penjelasan Pos-pos Neraca
	4.4.	Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
BAB V		PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VI		PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

*Ikhtisar
Realisasi
Pencapaian
Target
Kinerja
Keuangan*

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 Per tanggal 31 Desember sebesar Rp43.940.131.333,00 atau 96,74% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp45.419.255.074,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 per tanggal 31 Desember sebesar Rp39.111.847.437,00 atau 98,19% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp39.831.837.059,00 yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

*Hambatan
dan
Kendala*

2.2. Hambatan dan Kendala

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, hanya saja dimulai Semester ke II Tahun Anggaran 2024, Penatausahaan Keuangan menggunakan hanya 1 (satu) Aplikasi yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dibandingkan dengan Semester I yang juga menggunakan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL). Seperti diketahui bahwa menu pada SIPD Penatausahaan tidak selengkap menu pada SIMRAL. Sebagai contoh adalah bila terjadi revisi atau perbaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) karena kesalahan Input Data atau terbalik menuliskan angka, mekanismenya melibatkan Satuan Tugas (SATGAS) SIPD yang berada di Kemendagri, sehingga membutuhkan waktu. Belum lagi bila terjadi sistem jaringan error.

Dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam 12 Kegiatan dan 69 Sub Kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada APBD Murni, sebesar Rp46.333.243.670,00 dan mengalami Penyesuaian pada Perubahan Anggaran sebesar minus Rp913.988.596,00, sehingga menjadi sebesar Rp45.419.255.074,00. Adapun realisasi dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp136.063.200,00 atau 90,66% dari anggaran sebesar Rp150.088.800,00;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp21.909.350.813,00 atau sebesar 95,62% dari anggaran sebesar Rp22.912.082.000,00;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Realisasi Rp875.280.500,00 atau sebesar 98,44% dari anggaran sebesar Rp889.144.000,00;

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, realisasi sebesar Rp 1.238.666.711,00 atau sebesar 97,70% dari anggaran sebesar Rp1.267.806.124,00;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, realisasi sebesar Rp668,548,000,00 atau sebesar 99,69% dari anggaran sebesar Rp670,594,000,00;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi sebesar Rp10.936.038.709,00 atau sebesar 98,17% dari anggaran sebesar Rp11.139.624.650,00;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp1.379.543.400,00 atau sebesar 98,06% dari anggaran sebesar Rp1.406.795.800,00;
8. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, realisasi sebesar Rp2.352.130.200,00 atau sebesar 99,94 % dari anggaran sebesar Rp2.353.487.220,00;
9. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, realisasi sebesar Rp861.917.000,00 atau sebesar 96,14% dari anggaran sebesar Rp896.500.000,00;
10. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, realisasi sebesar Rp752.971.700,00 atau sebesar 91,32% dari anggaran sebesar Rp824.548.000,00;
11. Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, realisasi sebesar Rp2.675.659.600,00 atau sebesar 97,19% dari anggaran sebesar Rp2.753.087.480,00;
12. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, realisasi sebesar Rp153.961.500,00 atau sebesar 99,01% dari anggaran sebesar Rp155.497.000;

2.2.1. Belanja Operasi

Pada Tahun 2024, realisasi sebesar **Rp42.954.279.333,00** atau 96,69 % dari anggaran sebesar Rp44.426.953.074,00 terdiri dari:

2.2.1.1 Belanja Pegawai.

Realisasi anggaran Rp21.874.226.613,00 dari Pagu anggaran Rp22.876.685.000,00 dengan prosentasi 95,62 %

- 2.2.1. 2** Belanja Barang Jasa
Realisasi anggaran Rp21.080.052.720,00 dari Pagu anggaran Rp21.550.268.074,00 dengan prosentasi 97,82%
- 2.2.1. 3** Belanja Hibah
Realisasi anggaran Rp0,00 dari Pagu anggaran Rp0,00 dengan prosentasi 0%
- 2.2.1. 4** Belanja Bansos
Realisasi anggaran Rp0,00 dari Pagu anggaran Rp0,00 dengan prosentasi 0%

2.2.2. Belanja Modal

Pada Tahun 2024, realisasi sebesar Rp985.852.000,00 dari anggaran sebesar Rp992.302.000,00 dengan prosentasi 99,35%

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan Rp.XXX

4.1.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 karena Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten bukan SKPD Penghasil.

*Belanja
Rp43.940.131.333,00*

4.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada TA 2024 Per 31 Desember adalah sebesar Rp43.940.131.333,00 atau 96,74% dari anggaran belanja sebesar Rp45.419.255.074,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD Murni Tahun 2024	P APBD Tahun 2024	Realisasi Belanja TA 2024	
	Rp.	Rp.	Rp.	Prosen tase
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
BELANJA	46.333.243.670	45.419.255.074	43.940.131.333	96,74
BELANJA OPERASI	45.489.266.670	44.426.953.074	42.954.279.333	96,69
Belanja Pegawai	24.684.314.650	22.876.685.000	21.874.226.613	95,62
Belanja Barang dan Jasa	20.804.952.020	21.550.268.074	21.080.052.720	97,82
BELANJA MODAL	843.977.000	992.302.000	985.852.000	99,35
Belanja Peralatan dan Mesin	843.977.000	992.302.000	985.852.000	99,35
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0	0

Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	0
Belanja Aset Tetap lainnya	-	-	-	0
Belanja Aset lainnya	-	-	-	0
Jumlah	46.333.243.670	45.419.255.07	43.940.131.333	96,74

Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.828.283.896,00 atau 12,35% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terdapat pada pos Belanja Pegawai karena adanya Belanja Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Belanja Barang dan Jasa, sementara Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 19,17 % atau sebesar Rp233.884.300,00.

Tabel 2
Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Selisih Realisasi Belanja TA 2024 terhadap TA 2023	Prosentase naik/turun
	Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2	3	4=(2-3)	5=(4/3)
BELANJA	43.940.131.333	39.111.847.437	4.828.283.896	12,34
BELANJA OPERASI	42.954.279.333	37.892.111.137	5.062.168.196	13,36
Belanja Pegawai	21.874.226.613	19.605.760.558	2.268.466.055	11,57
Belanja Barang dan Jasa	21.080.052.720	18.286.350.579	2.793.702.141	15,28
BELANJA MODAL	985.852.000	1.219.736.300	-233.884.300	-19,17
Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin	985.852.000	1.219.736.300	-233.884.300	-19,17
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-

Belanja Aset Tetap lainnya	-	-	-	-
Belanja Aset lainnya	-	-	-	-
Jumlah	43.940.131.333	39.111.847.437	4.828.283.896	12,34

Belanja Operasi
Rp42.954.279.333,00

4.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp42.954.279.333,00 atau 96,69% dari pagu anggaran sebesar Rp44.426.953.074,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp37.892.111.137,00 atau 98,27% dari pagu anggaran sebesar Rp38.559.021.359,00. Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.062.168.196,00 atau bertambah 13,36%. Rincian realisasi belanja operasi sebagai berikut

Belanja Pegawai
Rp21.874.226.613,00

4.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.874.226.613,00 atau 95,62% dari pagu anggaran sebesar Rp22.876.685.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.605.760.558,00 atau 98,17% dari pagu anggaran sebesar Rp19.972.018.000,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 naik sebesar Rp2.268.466.055,00 atau 11,57%.

Kenaikan tersebut dikarenakan penambahan alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Belanja Barang dan Jasa
Rp21.080.052.720,00

4.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp21.080.052.720,00 atau 97,82% dari pagu anggaran sebesar Rp21.081.302.720,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.286.350.579,00 atau 98,38% dari pagu anggaran sebesar Rp18.587.003.359,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 bertambah sebesar Rp2.793.702.141,00 atau naik 15,28%.

Belanja Modal
Rp.985.852.000,00

4.1.2.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp985.852.000,00 atau 99,35% dari anggaran sebesar Rp992.302.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.219.736.300,00 atau 95,83% dari anggaran sebesar Rp1.272.815.700,00, Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp233.884.300,00 atau turun 19,17%.

Belanja Modal
Tanah Rp.XXX

4.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah Nihil.

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp.985.852.000,00

4.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp985.852.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp233.884.300,00 atau turun 19,17%, bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp1.219.736.300,00.

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan Rp.xxx

4.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023 adalah Nihil.

Belanja Modal Jalan
Irigasi dan Jaringan
Rp.xxx

4.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah Nihil.

Belanja Aset Tetap
Lainnya Rp.xxx

4.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah Nihil.

Belanja Aset Lainnya
Rp.xxx

4.1.2.2.6. Belanja Aset Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah Nihil.

Penjelasan Pos-pos LO

4.2 Penjelasan Pos-pos LO

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan LO
Rp.xxx

4.2.1. Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah Nihil. Karena Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten bukan SKPD Penghasil.

Beban LO
Rp.44.048.629.998,27

4.2.2. Beban LO

Realisasi Beban LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp44.048.629.998,27 sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp38.948.431.073,46. Rincian Beban LO adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Rincian Beban LO TA 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Selisih LO TA 2024 terhadap TA 2023	Prosen tase naik/turun
	Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2	3	4=(2-3)	5=(4/3)
BEBAN OPERASI	42.776.907.838,90	37.876.436.127,50	4.900.184.211,40	0,13
Beban Pegawai	21.874.226.613,00	19.605.760.558,00	2.268.466.055,00	0,12
Beban Barang dan Jasa	20.849.633.225,90	18.262.424.069,50	2.586.921.656,40	0,14
Beban Persediaan	2.071.268.175,00	1.606.077.550,00	464.903.125,00	0,29
Beban Jasa	14.085.812.964,90	12.601.737.060,50	1.484.075.904,40	0,12
Beban Pemeliharaan	1.300.347.400,00	1.404.967.300,00	- 104.619.900,00	- 0,07
Beban Perjalanan Dinas	3.392.204.686,00	2.649.642.159,00	742.562.527,00	0,28
Beban Aset Ekstrakontable	53.048.000,00	8.251.500,00	44.796.500,00	5,43
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.271.722.159,37	1.071.994.945,96	199.727.213,41	0,19
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.188.981.798,54	1.022.794.945,96	166.186.852,58	0,16
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.478.902,50	0,00	31.478.902,50	1,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	51.261.458,33	49.200.000,00	2.061.458,33	0,04
Jumlah	44.048.629.998,27	38.948.431.073,46	5.100.198.924,81	0,13

Defisit Non Operasional
Rpxxx

4.2.3. Defisit Non Operasional

Realisasi Defisit Non Operasional Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah Nihil.

Beban Luar Biasa

4.2.4. **Beban Luar Biasa**

Realisasi Beban Luar Biasa Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah Nihil.

Penjelasan Pos-pos Neraca

4.3. **Penjelasan Pos-pos Neraca**

Bendahara Pengeluaran Rpxxx

4.3.1. **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah Nihil dan pada tahun 2023 adalah Nihil.

Tabel 4
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	2	3
Kas di Bendahara Pengeluaran Tunai	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran BANK	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Bendahara Penerimaan Rpxxx

4.3.2. **Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Nihil dan Nihil karena Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten bukan SKPD Penghasil.

Lainnya dan Setara Kas Rpxxx

4.3.3. **Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Nihil dan Nihil Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	2	3
Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah	0,00	0,00

Pajak yang belum disetor	0,00	0,00
Honor Kegiatan yang belum dibagikan	0,00	0,00
Pengembalian Belanja yang belum disetor ke Kas Daerah	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Piutang Rpxxx

4.3.4. Piutang

Saldo Piutang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Nihil dan Nihil. Piutang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	2	3
Piutang Asuransi Kendaraan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek Rpxxx

4.3.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Nihil dan Nihil. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Beban Dibayar di
Muka
Rp59.506.632,00

4.3.6. Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp59.506.632,00 untuk pembayaran Asuransi Kendaraan yang masa berakhir pertanggungannya bulan September dan November 2025. Sementara Beban dibayar di Muka Tahun 2023 adalah Rp48.125.081,50.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 7
Rincian Belanja Dibayar di Muka

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Dibayar di Muka	59.506.632,00	48.125.081,50
Jumlah	59.506.632,00	48.125.081,50

Persediaan
Rp153.088.000,00.

4.3.7. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp153.088.000,00 dan Rp38.179.000,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 8
Rincian Persediaan

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Persediaan Alat Tulis Kantor	82.939.500	2.408.000
Kegiatan Kantor dan Cover	36.771.000	14.432.000
Bahan Komputer		18.834.000
Persediaan Perabot Kantor	33.377.500	
Persediaan Alat Listrik	-	2.505.000
Persediaan Plakat Cenderamata	-	-
Persediaan Barang Cetak	-	-
Jumlah	153.088.000,00	38.179.000

Tanah Rpxxx

4.3.8. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Nihil dan Nihil.

Peralatan dan Mesin

4.3.9. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Rp14.792.889.061,73 per 31 Desember 2024. Sementara untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp13.845.145.061,73 untuk Peralatan dan Mesin.

Adapun gambaran mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 9
Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo nilai Perolehan per 31 Desember 2023	13.845.145.061,73
Mutasi Tambah	0,00
Pembelian	0,00
Mutasi Masuk	0,00
Hibah Barang	0,00
Mutasi Kurang	0,00
- Mutasi ke Aset Lain-lain	0,00
- Ekstrakomtabel	0,00
Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023	10.624.333.626,90
Nilai Buku per 31 Desember 2023	3.220.811.434,83
Saldo nilai Perolehan per 31 Desember 2024	14.792.889.061,73
Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024	11.823.215.425,44
Nilai Buku per 31 Desember 2024	2.969.673.636,29

4.3.10. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp314.504.554,58 dan 629.578.050,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Mutasi transaksi gedung dan bangunan

Saldo Perolehan per 31 Desember 2023	629.578.050,00
Mutasi Tambah	0,00
Pembangunan Tambahan	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 1 Januari 2024	629.578.050,00
Kapitalisasi Debet per 31 Desember 2024	0,00
Akumulasi penyusutan sd 31 Desember 2024	315.073.495,42
Nilai Buku per 31 Desember 2024	314.504.554,58

Jalan Irigasi dan Jaringan Rp.xxx

4.3.11. Jalan Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 Rp0,00.

Aset Tetap Lainnya Rp.xxx

4.3.12. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah peralatan dan mesin gedung dan bangunan jalan irigasi dan jaringan. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 Rp0,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Rp.xxx

4.3.13. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp12.138.288.920,86

4.3.14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah Rp12.138.288.920,86 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.907.928.219,82.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
01	Peralatan dan Mesin	14.792.889.061,73	11.823.215.425,44	2.969.673.636,29
02	Gedung dan Bangunan	629.578.050,00	315.073.495,42	314.504.554,58
03	Jalan Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
04	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total		15.422.467.111,73	12.138.288.920,86	3.284.178.190,87

Aset Tak
Berwujud
Rp133.780.208,35

4.3.15. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp437.650.000,00 dan Rp338.700.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud

Saldo Perolehan per 31 Desember 2023	338.700.000,00
Mutasi Tambah	98.950.000,00
Pembangunan Tambahan	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	437.650.000,00
Akumulasi Amortisasi sd 31 Desember 2024	303.869.791,65
Nilai Buku per 31 Desember 2024	133.780.208,35

Aset Lain-Lain
Rp.0,00

4.3.16. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Nihil dan Nihil. Adapun gambaran Aset lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 13
Nilai Aset Lain-lain

Saldo Perolehan per 31 Desember 2023	0,00
Mutasi Tambah	0,00
Pembelian	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	511.010.735,00
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2024	511.010.735,00
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0,00

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.xxx

4.3.17. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Nihil dan Nihil. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

4.3.18. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Nihil. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Dan Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 14
SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode Yang Berakhir Sampai
dengan 2024 dan 2023

No	URAIAN	2024	2023
1.	EKUITAS AWAL	3.739.190.640,09	3.572.093.859,11
2.	SURFLUS/DEVISIT	(44.048.342.498,27)	(38.948.431.073,46)
3.	RK/PPKD	43.940.131.333,00	39.111.847.437,00
4.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	0,00	3.680.417,44
	- Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	- Selisish Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	- Koreksi Aset (Aset Tetap dan Persediaan)	0,00	0,00
	- Koreksi Investasi	0,00	3.680.417,44
	- Lain-lain	0,00	0,00
5.	EKUITAS AKHIR	3.630.979.474,82	3.739.190.640,09

4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran dibawah 90%

Gambaran Realisasi Belanja yang “realisasi per Sub Kegiatannya dibawah 90 %” per sub rincian objek lebih dikarenakan Rasionalisasi Honorarium Narasumber yang menjadi Pengajar tidak sesuai dengan yang diundang/ diwakili dan atau diambil alih oleh Pengajar dari Pejabat Intern Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten yang nilai Honorariumnya hanya dapat dibayarkan sebesar 50% dari Tarif Standar Satuan Harga yang berlaku Tahun Anggaran 2024. Terdapat 4 Sub Kegiatan dari 3 Kegiatan, adapun secara terperinci laporan Realisasi Anggaran dibawah 90% sebagai berikut:

I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi dengan Realisasi sebesar Rp136.063.200,00 atau 90,66% dari pagu anggaran sebesar Rp150.088.800,00 Adapun Sub Kegiatan dengan Realisasi Anggaran dibawah 90% sebagai Berikut:
1.	Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp38.006.300,00 atau 85,06% dari Pagu Anggaran sebesar Rp44.683.200,00
	Honorarium Narasumber Internal dengan tarif 50% dari Pagu DPPA.
II.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan Realisasi sebesar Rp861.917.000,00 atau 96,14% dari pagu anggaran sebesar Rp896.500.000,00. Adapun Sub Kegiatan dengan Realisasi Anggaran dibawah 90% sebagai Berikut:
1.	Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan realisasi sebesar Rp50.552.000 dari anggaran sebesar Rp57.420.000,00 atau 88,04%.
	Dikarenakan realisasi 50 % dari Tarif normal untuk Pegawai Internal Penyelenggara sebagai Narasumber dan Tenaga Ahli
2.	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, realisasi sebesar Rp40.715.000,00 dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00 atau sebesar 95,27%;
	Dikarenakan SOP belum ditandatangani Kepala Daerah, sehingga Belanja Penggandaan/Cetak belum bisa di serap
III.	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan realisasi sebesar Rp752.971.700,00 atau 91,32% dari anggaran sebesar Rp 824.548.000,00 . Adapun Sub Kegiatan dengan Realisasi Anggaran dibawah 90% sebagai berikut:
1.	Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dengan realisasi sebesar Rp75.066.000,- atau sebesar 88,31% dari Pagu Anggaran sebesar Rp85.000.000,00.

	Dikarenakan terdapat penurunan Tarif pada Penyelenggaraan pada Belanja Kursus Singkat / Pelatihan
IV.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, realisasi sebesar Rp2.675.659.600,00 atau sebesar 97,19% dari anggaran sebesar Rp2.753.087.480,00. Adapun Sub Kegiatan dengan Realisasi Anggaran dibawah 90 % sebagai berikut:
1.	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp12.533.500,- atau 86,44% dari pagu anggaran sebesar Rp14.500.000,-

BAB V

PENUTUP

Penutup

Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.